



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL



---

**Laporan Pertengahan Tahun  
Pelayanan Dukungan Bagi Korban  
(*Victim Support Service*)  
1 Januari – 30 Juni 2006**

---



*Embassy of the United States of  
America  
Dili, Timor Leste*

**Daftar Isi**

---

<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>2. PESERTA PROGRAM / KLIEN VSS.....</b>	<b>2</b>
<b>3. KEGIATAN VSS .....</b>	<b>4</b>
3.1    KOORDINASI DENGAN UNIT ORANG RENTAN (VPU) DARI KEPOLISIAN NASIONAL TIMOR LESTE	
3.2    MEMBANTU KORBAN KEKERASAN BERBASIS JENDER UNTUK MELANJUTKAN KASUSNYA MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA FORMAL .....	5
3.3    SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN .....	6
3.4    KEGIATAN VSS PASCA KRISIS KEAMANAN MEI – JUNI 2006.....	8
<b>4. STATISTIK KASUS KEKERASAN DOMESTIK DAN KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>11</b>
4.1    INFORMASI BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN .....	11
4.2    INFORMASI BERHUBUNGAN DENGAN TERSANGKA / PELAKU .....	13
<b>5. TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM MENDUKUNG KORBAN KEKERASAN BERBASIS JENDER .....</b>	<b>14</b>
5.1    KLIEN SEGAN MELANJUTKAN KASUS KEKERASAN BERBASIS JENDER DI PENGADILAN.....	14
5.2    KESULITAN DALAM MELANJUTKAN KASUS KEKERASAN BERBASIS JENDER MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA FORMAL .....	16
5.3    KESULITAN BERHUBUNGAN DENGAN KEBERADAAN HAKIM DAN JAKSA INTERNASIONAL, DAN BAHASA YANG DIGUNAKAN DALAM SISTEM HUKUM.....	16
5.4    ‘KRISIS’ KEAMANAN DAN POLITIK PADA BULAN MEI – JUNI DI TIMOR LESTE.....	17
<b>6. SUMBER DAYA DANA &amp; PENGELUARAN .....</b>	<b>19</b>

---

## 1. Pendahuluan

---

Victim Support Service (VSS) dibentuk pada bulan April 2005 untuk menghadapi berbagai persoalan yang berdampak pada kemampuan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender untuk mengakses sistem peradilan formal. VSS adalah bagian dari Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP), dan pada saat ini mempekerjakan lima anggota staf secara waktu penuh. Sejak pembentukannya, VSS telah membantu 84 korban kekerasan berbasis gender (kekerasan domestik dan kekerasan seksual) dengan mendampingi korban di kantor polisi, kantor kejaksaan dan pengadilan, memberi bantuan praktis seperti makanan dan transportasi, dan membantu korban untuk mengerti proses hukum, peranan para aktor pengadilan dan putusan dari pengadilan. Sebelum krisis keamanan terjadi pada Mei – Juni 2006,<sup>1</sup> VSS bekerja secara erat dengan Unit Orang Rentan (*Vulnerable Persons Unit*) (VPU) di distrik Dili dan Liquisa, serta dengan Kantor Jaksa Agung, dan membantu lembaga-lembaga tersebut untuk menginvestigasi dan menuntut kekerasan berbasis gender dan menjamin bahwa hak-hak korban dihormati. VSS juga meningkatkan kesadaran atas pelayanan VSS, sistem peradilan pidana dan persoalan yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender melalui pembagian poster dan brosur, membuat program radio dan televisi, dan dengan ikut serta dalam latihan dan lokakarya.

Krisis keamanan Timor Leste pada Mei – Juni 2006 mengharuskan VSS untuk meninjau kelayakan semua kegiatan dan menyesuaikan program dengan perubahan dalam sistem peradilan pidana (yang terpenting adalah kenyataan bahwa Kepolisian Timor Leste ('PNTL') dan VPU-VPU tidak berfungsi di Dili) serta lingkungan keamanan yang telah

---

<sup>1</sup> Kekerasan yang terjadi baru-baru ini merupakan kejadian terburuk sejak Timor Leste melakukan jajak pendapat untuk kemerdekaan pada tahun 1999, kejadian ini dipicu pada Maret ketika 597 serdadu dipecat, yang merupakan lebih dari sepertiga anggota militer Timor Leste. Para serdadu ('para pemohon') mogok sebagai protes terhadap tuduhan terjadinya diskriminasi berdasarkan wilayah dalam militer, dan menolak untuk kembali pada baraknya setelah diperintahkan demikian. Pemecatannya menimbulkan bentrokan antara Kepolisian Nasional Timor Leste dan pasukan yang setia pada para pemohon. Tindakan yang penuh kekerasan terhadap para pemohon (serta pasukan yang setia pada para pemohon) oleh tentara pada akhir April menyebabkan pemecahan yang lebih luas baik di dalam maupun antara militer dan polisi dan menimbulkan bentrokan antara fraksi-fraksi pasukan keamanan, dan hal tersebut memicu kekerasan yang dilakukan oleh gang-gang di ibu kota selama beberapa minggu. Dalam kekerasan tersebut 37 orang dibunuh dan kebanyakan penduduk Dili yang sebesar 130,000 orang terpaksa pindah dari rumahnya ke distrik-distrik atau pusat-pusat IDP di Dili. Setelah kerusuhan selesai, muncul tuduhan-tuduhan bahwa Perdana Menteri Mari Alkatiri mempersenjatai 'pasukan pembunuh' untuk memusnahkan pihak lawannya, dan ada tuntutan agar dia mengundurkan diri. Mari Alkatiri akhirnya mengundurkan diri pada akhir Juni, setelah ancaman dari presiden Timor Leste Xanana Gusmao bahwa dia akan mengundurkan diri kalau Perdana Menteri menolak untuk turun. Pada akhir Juni pengunduran Perdana Menteri tidak banyak berpengaruh untuk mengurangi ketidakstabilan dan ketidakamanan di Dili.

berubah. VSS juga menyesuaikan program dan prioritasnya agar tepat dengan situasi krisis humaniter – pada khususnya kehadiran puluhan ribu *Internally Displaced Persons* (IDP) (pengungsi dalam negeri) yang tinggal di pusat-pusat pengungsi di Dili. Kegiatan VSS sebagai jawaban terhadap krisis ini akan diuraikan di bawah.

## **2. Peserta Program / Klien VSS**

---

Selama enam bulan pertama pada 2006 VSS secara langsung membantu 28 perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Walaupun program VSS sampai saat ini pada utamanya menargetkan korban di distrik Dili, program tersebut juga memberi dukungan (selama periode enam bulan itu) kepada dua korban di distrik Liquica dan satu korban di distrik Maliana. Staf VSS juga mengunjungi distrik Liquica, Aileu, Ermera, Baucau, Manatuto, Viqueque dan Los Palos, dan bertemu dengan VPU di setiap distrik dengan maksud untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan VSS dan mendorong rujukan dari distrik-distrik tersebut. Sayangnya, dari akhir April sampai akhir Juni, kunjungan berkala ke VPU-VPU dan organisasi perempuan di distrik-distrik harus ditunda karena keprihatinan tentang keamanan yang berhubungan dengan perjalanan antara Dili dan distrik lain. Jika keamanan membaik, diharapkan bahwa kunjungan ke distrik-distrik tersebut akan dimulai kembali pada Juli.

Yang dibawah adalah statistik yang menggambarkan jumlah klien yang dirujuk pada VSS pada enam bulan pertama pada tahun 2006.

**Tabel 1. Sumber Rujukan untuk Klien VSS**

<b>Sumber Rujukan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Polisi	24	86%
Jaksa	0	0%
Fokupers	2	7%
Pradet	0	0%
Alola	0	0%
OPE	1	4%
Datang sendiri	0	0%
Oxfam	1	4%
Lain	0	0%
Total:	28	100%

**LAPORAN PERTENGAHAN TAHUN - VICTIM SUPPORT SERVICE**  
**JANUARI – JUNI 2006**

**Tabel 2. Klien VSS Berdasarkan Distrik**

Distrik	Jumlah	Persentase
Dili	25	89%
Liquiça	2	7%
Aileu	0	0%
Ermera	0	0%
Manatutu	0	0%
Baucau	0	0%
Distrik Lain	1	4%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3. Klien VSS Berdasarkan Umur**

Umur	Jumlah	Persentase
< 5	2	7%
5 – 12	2	7%
13 – 17	2	7%
18 – 25	8	29%
26 – 35	7	25%
> 35	7	25%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

**Tabel 4. Klien VSS - Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak sekolah	14	50%
SD	6	21%
SMP	3	11%
SMA	4	14%
Universitas	0	0%
Tidak Tahu	1	4%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

**Tabel 5. Klien VSS – Status Perkawinan**

Status Perkawinan	Jumlah	Persentase
Kawin	16	57%
De facto (tinggal bersama)	0	0%
Tunangan	0	0%
Belum Menikah	9	32%
Janda	3	11%
Berpisah/Cerai	0	0%
Kepala Keluarga	0	0%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

### 3. Kegiatan VSS

---

#### 3.1 *Koordinasi dengan Unit Orang Rentan (VPU) dari Kepolisian Nasional Timor Leste*

Untuk memaksimalkan tingkat dukungan yang diberikan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, selama keempat bulan pertama pada tahun 2006 staf VSS secara berkala menghadiri dan menghubungi VPU-VPU di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Dili - Liquica, Ermera, Aileu dan Dili. Pada khususnya untuk VPU Distrik Dili, staf VSS menghadiri kantornya tiga kali setiap minggu dan dihubungi oleh VPU pada setiap kali seorang korban tiba di kantor apabila VSS tidak ada. Untuk membantu VPU-VPU yang kekurangan sumber daya agar mereka dapat memenuhi peranannya dan mempertahankan kontak dengan VSS, maka VSS memberi mobile telepon dan kartu telepon kepada VPU-VPU. Dari waktu ke waktu VSS juga membantu VPU dengan berbagai macam persoalan seperti transportasi, printing dan fotokopi.

Walaupun VSS belum mengikuti jadwal kehadiran yang teratur di VPU distrik Liquica, Ermera dan Aileu, VSS sebenarnya (sebelum krisis keamanan Mei – Juni) secara berkala melakukan kontak lewat telepon dengan VPU-VPU di distrik-distrik tersebut, dan melakukan perjalanan ke distrik-distrik apabila diberitahu tentang kasus baru yang menyangkut kekerasan berbasis gender.

Selama keempat bulan pertama pada tahun 2006, hubungan yang begitu kuat antara VSS dan VPU-VPU (pada khususnya di Dili dan Liquica) memungkinkan VSS untuk bekerja erat dengan para petugas polisi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang persoalan yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender. Dalam hal ini, staf VSS melakukan diskusi dengan para petugas polisi tentang persoalan seperti bagaimana harus bereaksi apabila seorang menceritakan kekerasan berbasis gender, pentingnya untuk tidak merasionalisasikan pengalaman korban ('pasti dia lakukan sesuatu dan pantas menerimanya'), cara terbaik untuk membantu korban agar mereka bisa mendapatkan dukungan yang diperlukannya, dan cara terbaik untuk menjamin bahwa hak-hak korban dihormati oleh proses peradilan pidana formal. Sayangnya, pada akhir Juni VPU Distrik Dili tidak lagi berfungsi, dan fungsinya untuk sementara digantikan oleh Polisi Federal Australia ('AFP'). Oleh karena itu, salah satu tantangan bagi VSS untuk pertengahan kedua dari tahun 2006 adalah membentuk hubungan dengan AFP, dan untuk menjamin bahwa –walaupun keadaan di Dili telah berubah - korban kekerasan domestik dan kekerasan seksual akan tetap mempunyai akses terhadap dukungan dan dorongan yang diperlukan agar mereka dapat membawa kasusnya melalui sistem peradilan pidana.

Dari kasus-kasus yang dirujuk kepada VSS yang dibawa ke pengadilan selama keenam bulan pertama pada tahun 2006 (14 kasus), VSS membantu VPU untuk menyiapkan kasus sebaik mungkin sebelum diserahkan kepada jaksa, yang dilengkapi bukti yang terkuat (misalnya dengan mengambil foto luka-luka korban yang dapat dilihat), dan apabila perlu membantu jaksa menyampaikan kasus kepada pengadilan dan menyiapkan kasus untuk persidangan.

### ***3.2 Membantu korban kekerasan berbasis jender untuk melanjutkan kasusnya melalui sistem peradilan pidana formal***

Pada pertengahan pertama dari tahun 2006 VSS membantu 28 korban kekerasan berbasis jender untuk melanjutkan kasusnya melalui sistem peradilan formal dengan:

- Mendampingi korban ke VPU, rumah sakit, kantor kejaksaan dan/atau pengadilan;
- Menjelaskan fungsi dan tanggungjawab semua aktor di sektor peradilan formal (polisi, pembela, jaksa dan hakim);
- Memberi penjelasan kepada korban dan keluarganya tentang hak-hak korban, dan tentang peranan korban dalam sistem peradilan pidana;
- Memberi dukungan pribadi kepada korban selama sidang, wawancara dan persidangan; dan
- Menjamin bahwa korban mempunyai informasi yang memadai tentang perkembangan kasusnya dan investigasi, penuntutan dan persidangan, tentang proses peradilan pidana, tentang penahanan tersangka (apabila tepat), dan tentang semua putusan yudisial yang dilakukan.

Bagi banyak korban kekerasan berbasis jender, rasa takut pada proses peradilan formal merupakan hal yang mencegah mereka memutuskan untuk melanjutkan kasus melalui proses peradilan formal (bagi 17% korban yang memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya di pengadilan, rasa takut pada proses pengadilan disebutkan sebagai hal terpenting yang mencegahnya). Dengan mendukung korban selama proses peradilan pidana, dan dengan menjamin bahwa korban mempunyai pengertian jelas tentang prosedur dan hak-haknya, VSS bertujuan untuk meminimalkan dampak dari ‘rasa takut terhadap proses pengadilan’ yang mencegah korban kekerasan berbasis jender dari menggunakan sistem peradilan pidana formal.

Statistik VSS juga menunjukkan bahwa bagi 50% korban yang memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya melalui proses peradilan pidana formal, faktor terpenting yang mempengaruhinya adalah ‘faktor ekonomi.’ Walaupun VSS tidak mempunyai kapasitas untuk menghadapi masalah ini secara sepenuhnya, VSS bertujuan untuk mengurangi jumlah korban yang tidak mampu melanjutkan kasusnya karena faktor ekonomi dengan

memberi bantuan praktis dan finansial seperti bantuan dengan transportasi, makanan dan akomodasi.

Bagi 17% perempuan dan anak lainnya yang menjadi korban kekerasan berbasis gender yang dirujuk kepada VSS yang memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya di pengadilan, faktor terpenting yang mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan tersebut adalah tekanan dari keluarga. Oleh karena itu, VSS bekerja dengan korban dan anggota keluarganya untuk membantu keluarga mengerti bahwa kekerasan berbasis gender adalah kejahatan dan tidak ada satu perempuan pun yang pantas menjadi korban, dan membantu anggota keluarga mengerti implikasi dari keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan kasusnya melalui pengadilan.

Dalam ke-14 kasus yang dirujuk kepada VSS yang sebenarnya dibawa ke pengadilan selama pertengahan pertama dari tahun 2006, VSS bekerja dengan korban selama setiap tahap proses untuk membantunya mengerti proses hukum dan hak-haknya sebagai korban, dan untuk mendukungnya agar dia mampu menggambarkan kasusnya seakurat dan selengkap mungkin di hadapan hakim. Dalam sejumlah kasus VSS juga bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk memaksimalkan kemungkinan bahwa penuntutan akan berhasil – misalnya dengan membantu kejaksaan dalam pengumpulan bukti agar kasus yang sekuat mungkin dapat disampaikan kepada pengadilan. Apabila korban tidak setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, VSS berbicara dengan jaksa atas nama korban, dan menjamin bahwa hak-hak korban dimengerti, dan apabila tepat memohon agar putusan tersebut dibanding. Apabila tepat, VSS juga memberi rujukan kepada pihak lain yang memberi pelayanan seperti konseling, rumah aman atau tempat perlindungan.

Akhirnya, bagi perempuan dan anak perempuan yang memilih untuk melanjutkan kasus kekerasan berbasis gender melalui sistem peradilan formal, VSS menjelaskan kepada korban tersebut bahwa dengan melanjutkan kasusnya di pengadilan, mereka memberi kontribusi terhadap pencapaian keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender di Timor Leste.

### **3.3 *Sosialisasi dan pendidikan***

Selama pertengahan pertama dari tahun 2006 VSS merancang, menghasilkan dan membagi 10,000 poster yang mengandung pesan-pesan penting tentang kekerasan domestik dan kekerasan seksual (5,000 poster terfokus pada kekerasan domestik, 5,000 terfokus pada kekerasan seksual), dan 6,000 brosur yang mengandung informasi terperinci tentang Pelayanan Dukungan Bagi Korban (*Victim Support Service*) dan tentang kekerasan berbasis gender. Semua publikasi mengandung informasi tentang

**LAPORAN PERTENGAHAN TAHUN - VICTIM SUPPORT SERVICE  
JANUARI – JUNI 2006**

dukungan yang diberikan oleh VSS, serta perincian tentang cara untuk menghubungi VSS. Poster dan brosur didistribusi antara VPU-VPU di yurisdiksi Pengadilan Distrik Dili (Liquica, Ermera, Aileu, Dili), dan antara organisasi perempuan dan organisasi masyarakat yang mempunyai kontak dengan korban kekerasan berbasis gender.

VSS juga bekerja sama dengan Unit Keadilan Perempuan (*Women's Justice Unit*) di JSMP untuk menghasilkan 9,000 brosur yang berjudul 'Informasi tentang Proses Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual dan Kekerasan Domestik.' Brosur tersebut menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila seorang menjadi korban kejahatan tersebut, dan memberi informasi umum tentang kekerasan domestik dan kekerasan seksual serta tentang proses hukum. Brosur tersebut akan secepat mungkin, dengan tergantung pada keadaan sekarang, didistribusikan kepada masyarakat, polisi, kelompok perempuan, NGO lokal, dan *Chefe Suco* (kepala desa).

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan berbasis gender dan pelayanan VSS, maka VSS mengadakan acara diskusi yang disiarkan melalui radio dan televisi oleh *Radio Televisaun Timor Leste* (RTTL) – serta didistribusikan antara sembilan stasiun radio komunitas agar dapat disiarkan melalui radio komunitas. Diskusi tersebut terfokus pada dampak dari kekerasan seksual pada anak, dan termasuk pembicaraan dari VSS, *Lembaga Bantuan Hukum* (LBH) dan Departemen Pelayanan Sosial (DNSS) dalam Kementerian Tenaga Kerja dan Solidaritas. VSS juga mengadakan pengumuman radio komunitas bagi stasiun radio RTK untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender, hak-hak perempuan dan pelayanan yang diberikan oleh VSS.

VSS telah melibatkan masyarakat, NGO-NGO lokal, polisi dan mitra lain dalam program-programnya dengan menyediakan latihan tentang persoalan yang berhubungan dengan sistem peradilan dan kekerasan berbasis gender. Selama pertengahan pertama dari tahun 2006 VSS ikut serta (sebagai fasilitator) dalam dua latihan yang diadakan oleh Fokupers di distrik-distrik – yang menargetkan anggota masyarakat, tetapi juga dihadiri oleh polisi dan kelompok perempuan. VSS juga membantu untuk memfasilitasi dua latihan yang diadakan oleh Akademi Polisi Timor Leste, yang menargetkan polisi yang baru direkrut dan terfokus pada persoalan yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender. Pada bulan Maret 2006, VSS bekerja dengan United Nations Population Fund (UNFPA) dan Unit Hak Asasi Manusia dari Kantor PBB di Timor Leste (UNOTIL) untuk mengadakan lokakarya satu hari tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste yang baru, dengan fokus khusus pada dampak dari Kitab Undang-Undang tersebut pada perempuan yang menjadi korban kejahatan. Lokakarya itu dihadiri oleh kira-kira 20 peserta, termasuk anggota polisi dari VPU di Liquica dan Dili. Umpan balik yang diterima pada akhir lokakarya itu adalah sangat positif, walaupun para peserta

mengatakan bahwa mereka lebih suka lokakarya yang berlangsung selama dua hari supaya mereka dapat meneliti materi secara lebih komprehensif.

Sebagai dampak dari lingkungan operasi yang telah berubah di Timor Leste sejak akhir April 2006, VSS belum dapat melanjutkan kegiatan sosialisasi melalui radio dan televisi sejak waktu itu. Ini sebagian dikarenakan kenyataan bahwa stasiun radio komunitas belum berfungsi, dan sebagian karena keprihatinan keamanan yang berhubungan dengan perjalanan ke distrik-distrik, dan sebagian karena ada perasaan bahwa perhatian publik terfokus pada persoalan lain. Kegiatan sosialisasi lewat radio dan televisi akan dimulai kembali secepat mungkin dalam keadaan.

### ***3.4 Kegiatan VSS pasca krisis keamanan Mei – Juni 2006***

Sebagaimana disebutkan di atas, keadaan politik dan keamanan di Timor Leste pada Mei – Juni 2006 tentu saja berdampak besar pada kegiatan VSS. Suasana yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakstabilan, selama periode dua bulan, berarti bahwa pada waktu tertentu staf merasa tidak dapat mendatangi tempat kerjanya. Perjalanan ke distrik-distrik telah dibatasi – pada khususnya bagi staf dari bagian Barat yang ingin melakukan perjalanan ke distrik-distrik Timur, dan sejumlah organisasi lokal yang mendukung VSS (seperti stasiun radio komunitas) beroperasi dengan kapasitas terbatas atau tidak beroperasi samasekali. Yang paling signifikan, pada akhir Mei VPU di distrik Dili tidak berfungsi – hal ini signifikan bagi VSS karena pada masa lalu lebih dari 80% rujukan berasal dari VPU. Fungsi PNTL, dan VPU, diambilalih oleh AFP. Lagipula, oleh karena sebagian besar penduduk Dili pindah dari rumahnya dan sekarang tinggal di pusat-pusat pengungsi, banyak orang tidak mempunyai akses pada transportasi, dan ada kemungkinan lebih kecil bahwa mereka akan melaporkan kekerasan berbasis gender bahkan apabila mereka mengetahui dimana dan kepada siapa hal tersebut harus dilaporkan.

Pada Juni VSS melakukan perencanaan untuk mempertimbangkan sejauh mana VSS dapat tetap melaksanakan kegiatan yang direncanakan di lingkungan operasi yang telah berubah, dan juga untuk mempertimbangkan kenyataan bahwa kebutuhan dan prioritas telah mengalami perubahan yang sangat besar, dan tiba-tiba berubah karena kehadiran puluhan ribu pengungsi di distrik Dili. VSS mengambil keputusan bahwa selain daripada melaksanakan kegiatan yang direncanakan sejauh keadaan memungkinkan, usaha juga akan terfokus pada (a) menilai dan mencegah kekerasan berbasis gender dalam pusat-pusat pengungsi di Dili, dan memberi dukungan kepada korban kekerasan berbasis gender di pusat-pusat tersebut; dan (b) membentuk hubungan kerja dengan AFP untuk menjamin bahwa korban kekerasan berbasis gender dirujuk apabila tepat.

**LAPORAN PERTENGAHAN TAHUN - VICTIM SUPPORT SERVICE  
JANUARI – JUNI 2006**

Selama periode dua minggu, yang mulai pada tanggal 12 Juni, staf VSS membantu Provedor Hak Asasi Manusia dan Keadilan untuk melakukan penilaian hak asasi manusia di tempat-tempat pengungsi di Dili. Staf tersebut bekerja di bawah Jaringan Pemantauan Hak Asasi Manusia (sebuah organisasi payung untuk NGO-NGO Hak Asasi Manusia) untuk menilai kebutuhan bantuan humaniter di tempat-tempat pengungsi tersebut. NGO lokal lainnya juga terlibat dalam penilaian, seperti: Forum Tau Matan, Fokupers, Lao Hamutuk, Luta Hamutuk, *Peace and Democracy Foundation* dan Perkumpulan HAK. Penilaian dilakukan melalui kuestioner formal dan sesi-sesi umpan balik yang tidak formal dengan para pengungsi. Temuan penilaian dipresentasikan di hadapan pertemuan koordinasi antar-lembaga yang melibatkan wakil-wakil dari pasukan penjagaan perdamaian internasional, pemerintah Timor Leste dan NGO-NGO.

Pada pertengahan pertama dari bulan Juni 2006, dibentuknya Kelompok Kerja Kekerasan Berbasis Jender– yang dipimpin oleh UNFPA dan termasuk JSMP (VSS serta Unit Keadilan Perempuan), Kantor Untuk Promosi Kesetaraan ('OPE'), Fokupers, Pradet, Rede Feto, dan lain-lain – untuk berfokus pada penilaian dan pencegahan, serta memberi jawaban pada Kekerasan Berbasis Jender di pusat-pusat pengungsi di Dili. Sebagai bagian dari proyek yang diawasi oleh Rede Feto dan didanai UNFPA, para anggota kelompok kerja membentuk enam tim (termasuk satu tim VSS) dan melakukan penilaian tidak formal tentang tingkat Kekerasan Berbasis Jender di setiap dari ke-56 pusat pengungsi di distrik Dili. Penilaian dilakukan selama periode lima hari, melalui diskusi tidak resmi dengan para koordinator pusat pengungsi, tokoh-tokoh seperti pastor dan suster, dan perempuan di pusat pengungsi. Penilaian tersebut mencari informasi seperti:

- Apakah perempuan merasa bahwa mereka mempunyai akses pada informasi di pusat pengungsi;
- Apakah kekerasan terhadap perempuan di pusat pengungsi telah dilaporkan, dan apakah ada masalah dengan keamanan dan keselamatan perempuan dan anak perempuan di pusat pengungsi;
- Apakah ada kelompok perempuan yang merasa lebih rentan daripada kelompok lain, atau apakah ada perempuan yang merasa lebih rentan pada saat tertentu; dan
- Menurut perempuan di pusat pengungsi, apakah ada sesuatu yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerentanan perempuan terhadap kekerasan.

Berdasarkan hasil penilaian, para anggota kelompok kerja akan bekerja sama untuk mengembangkan tindakan untuk mencegah dan memberi jawaban terhadap Kekerasan Berbasis Jender di pusat-pusat pengungsi. Diharapkan bahwa tindakan tersebut akan termasuk pembentukan komite-komite dukungan bagi kaum perempuan di pusat-pusat pengungsi, latihan dan pendidikan bagi komite tersebut, dan distribusi materi yang memberi informasi tentang proses hukum dan pelayanan dukungan yang tersedia bagi korban Kekerasan Berbasis Jender. Kelompok kerja Kekerasan Berbasis Jender juga

**LAPORAN PERTENGAHAN TAHUN - VICTIM SUPPORT SERVICE  
JANUARI – JUNI 2006**

akan memonitor dan menyusun informasi tentang tingkat Kekerasan Berbasis Jender di pusat-pusat pengungsi. Kegiatan ini akan berlanjut sejauh pengungsi dalam negeri tetap ada di pusat-pusat pengungsi – kerangka waktu yang sulit diramalkan, tetapi diperkirakan sekurang-kurangnya dua bulan. Informasi yang dikumpulkan dari penilaian, dan kegiatan yang diambil sebagai jawaban, akan diuraikan dalam laporan VSS berikutnya.

#### **4. Statistik kasus kekerasan domestik dan kekerasan seksual**

---

Dari semua klien, VSS mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan korban, tersangka (atau pelaku), sifat kejadian, dan perkembangan kasus melalui sistem peradilan pidana. Informasi yang dikumpulkan adalah sesuai dengan standar internasional untuk pemantauan dan penilaian program Kekerasan Berbasis Gender – sebagaimana disebutkan dalam *Reproductive Health for Refugees Consortium's Gender Based Violence Tools Manual*.<sup>2</sup>

Informasi yang menggambarkan demografik klien VSS telah diuraikan di atas, sedangkan informasi yang berhubungan dengan pemrosesan kasus melalui sistem peradilan pidana dicantumkan dalam bagian lima – ‘tantangan yang dihadapi dalam mendukung korban kekerasan berbasis gender.’ Bagian tersebut menyampaikan informasi tentang sifat kejadian dan tentang tersangka/pelaku.

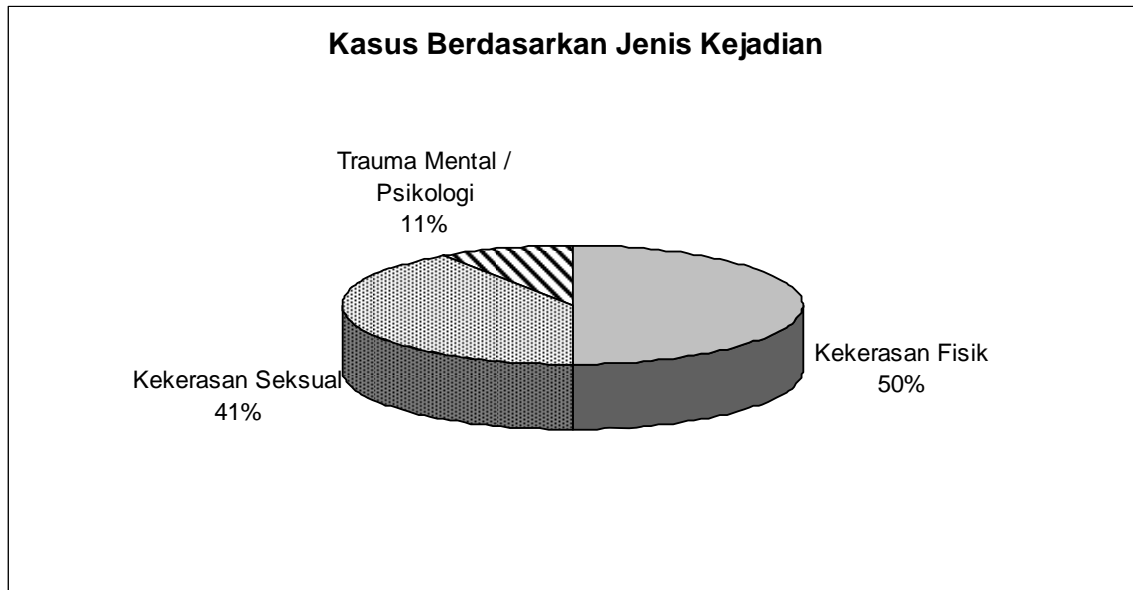
##### **4.1 Informasi berhubungan dengan kejadian**

50% dari kasus yang dirujuk kepada VSS selama pertengahan pertama pada tahun 2006 adalah kasus penyerangan fisik, 39% adalah kasus kekerasan seksual dan 11% adalah kasus trauma psikologi atau mental. Lebih dari 50% kasus yang dirujuk adalah kasus kekerasan domestik yang menyangkut pasangan atau anggota keluarga lainnya, sedangkan 18% kasus menyangkut perkosaan orang dewasa dan 22% menyangkut perkosaan atau percobaan perkosaan pada anak di bawah umur. 82% kejadian yang dirujuk kepada VSS terjadi di tempat tinggal korban. Angka-angka di bawah menunjukkan perincian selanjutnya tentang sifat kasus yang dirujuk kepada VSS selama periode tersebut.

---

<sup>2</sup> Lihat *Reproductive Health for Refugees Consortium*, ‘Buku Pedoman Kekerasan Berbasis Gender untuk Penilaian, Desain Program, Pemantauan dan Evaluasi,’ Februari 2003.

**Grafik 1**



**Tabel 6. Jenis Kejadian dan Persentasi Klien VSS yang Terpengaruh**

Jenis Kejadian	Jumlah	Persentase
Kekerasan Domestik (Pasangan)	10	36%
Kekerasan Domestik (Anggota Keluarga Lainnya)	4	14%
Diterlantarkan	1	3.5%
Kekerasan Domestik (Lain)	1	3.5%
Perkosaan (Dewasa)	5	18%
Percobaan Perkosaan (Dewasa)	2	7%
Kekerasan Seksual	1	3.5%
Perkosaan (Anak di bawah umur)	3	11%
Percobaan Perkosaan (Anak di bawah umur)	3	11%

**Tabel 7. Lokasi Kejadian**

Lokasi	Jumlah	Persentase
Di tempat tinggalnya	23	82%
Di tempat tinggal yang berdekatan	2	7%
Daerah belukar di luar kota	1	4%
Di tempat publik (pasar, jalan dll)	1	4%
Daerah Pantai	0	0%
Daerah Lain	1	4%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

#### **4.2 Informasi berhubungan dengan tersangka / pelaku**

Statistik VSS menunjukkan bahwa dalam kebanyakan kasus yang dirujuk kepada VSS, pelaku berumur antara 18 - 35 tahun (29% antara 18 – 20 tahun, 11% antara 21 – 25 tahun, dan 39% antara 26 – 35 tahun), dan adalah pasangan atau suami dari korban. Mayoritas kasus yang dirujuk kepada VSS hanya menyangkut satu tersangka/pelaku, walaupun ada satu kasus yang melibatkan dua pelaku, dan kasus lainnya yang melibatkan empat pelaku. Separuh kasus dilakukan oleh pasangan atau suami korban.

**Tabel 8. Hubungan Korban dengan Pelaku/Tersangka**

<b>Jenis Hubungan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Pasangan/Suami	14	50%
Anggota keluarga lainnya	5	18%
Orang tidak dikenal	4	14%
Ayah/ ayah tiri/saudara laki-laki	2	7%
Tetangga atau orang yang tinggal berdekatan	3	11%
Teman atau teman keluarga	0	0%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

---

## 5. Tantangan yang dihadapi dalam mendukung korban kekerasan berbasis jender

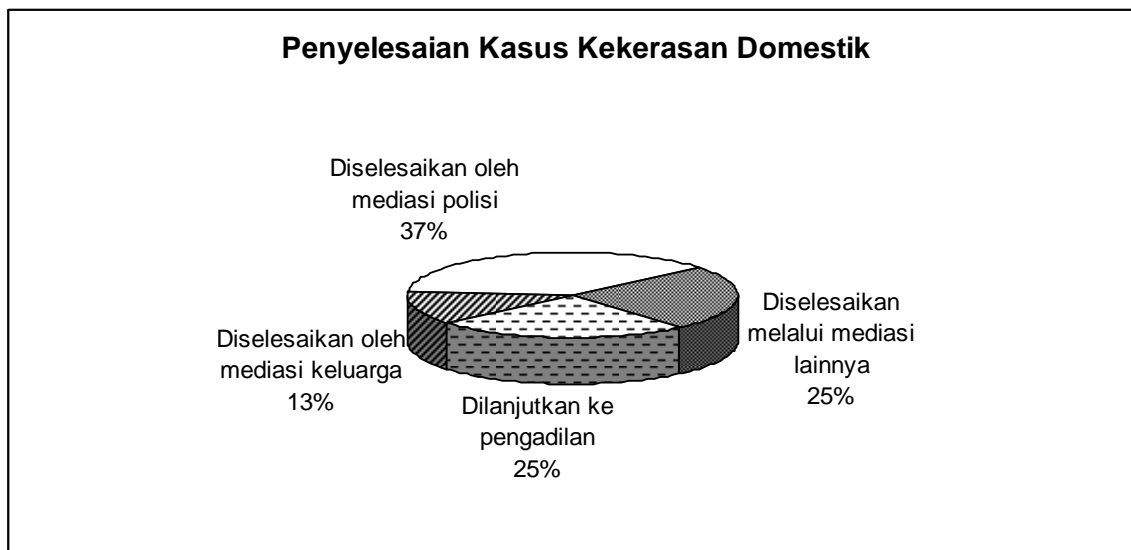
---

### 5.1 *Klien segan melanjutkan kasus kekerasan berbasis jender di pengadilan*

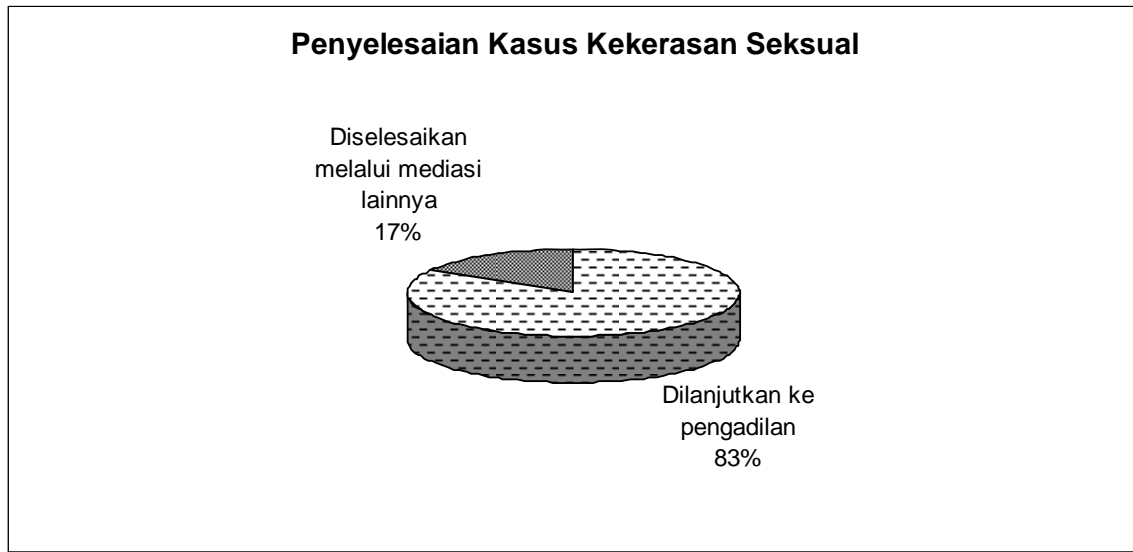
Faktor yang paling signifikan yang berdampak pada kemampuan VSS untuk meningkatkan persentase kasus kekerasan berbasis jender yang berhasil di pengadilan adalah faktor yang selama ini mencegah perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis jender di Timor Leste dari menggunakan sistem peradilan formal.

Dalam halnya kekerasan domestik, sampai sekarang hanya sebagian kecil kasus dilanjutkan sampai pengadilan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah, 75% korban kasus kekerasan domestik memilih untuk menyelesaikan kasusnya melalui mediasi (mediasi oleh polisi, mediasi keluarga atau yang lain), dan hanya 25% kasus dilanjutkan melalui sistem peradilan formal. Dari kasus perkosaan dan kasus kekerasan seksual (yang juga ditunjukkan di bawah), 17% diselesaikan melalui mediasi. Masalah ini sebagian disebabkan oleh kecenderungan polisi dan jaksa yang selama ini menyarankan mediasi untuk kasus yang seharusnya diadili di pengadilan, tetapi faktor yang lebih berpengaruh adalah keseganan korban untuk menggunakan proses peradilan formal (karena faktor ekonomi, tekanan keluarga dan lain-lain).

Grafik 2



Grafik 3



Antara perempuan yang memilih untuk tidak melanjutkan kasus kekerasan berbasis gender ke pengadilan (termasuk perkosaan dan kekerasan seksual serta kekerasan domestik), 50% pada utamanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, 17% oleh tekanan dari keluarganya, 17% oleh rasa takut pada proses pengadilan, 8% oleh tekanan dari tersangka, dan 17% oleh rasa takut akan pisah ranjang atau cerai.

Peningkatan dalam persentase kasus kekerasan berbasis gender yang dilanjutkan melalui sistem peradilan formal adalah tujuan jangka panjang yang memerlukan perubahan besar pada sikap-sikap yang dimiliki pihak tertentu dalam sistem peradilan serta dalam masyarakat Timor Leste. Program VSS memantau (setiap bulan) faktor-faktor yang mencegah perempuan dari menggunakan sistem peradilan formal dan berusaha untuk tetap responsif terhadap persoalan tersebut – mendorong korban kekerasan berbasis gender untuk melanjutkan kasusnya ke pengadilan dan membantu korban untuk mengatasi faktor yang seringkali disebutkan sebagai halangan dalam mengakses sistem peradilan. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan proses pengadilan (yang mengurangi rasa takut pada sistem pengadilan), membantu korban mengakses dukungan finansial dan psiko-sosial apabila tepat, dan membantu dengan transportasi.

Sebagaimana dicatat di bagian lain dari laporan ini, VSS telah mengambil sejumlah langkah untuk mendidik polisi, jaksa dan anggota masyarakat (termasuk anggota keluarga korban, yang juga sangat penting) tentang kekerasan berbasis gender. Usaha tersebut termasuk memberi latihan formal kepada polisi, NGO-NGO dan anggota masyarakat, diskusi tentang kekerasan berbasis gender di televisi dan radio serta distribusi brosur dan poster – dengan fokus atas keperluan untuk memperkuat pengertian masyarakat Timor Leste bahwa kekerasan berbasis gender adalah kejahatan. Walaupun

demikian, faktor-faktor eksternal akan terus-menerus berdampak pada kemampuan VSS untuk meningkatkan persentase perempuan yang merasa rela dan mampu melanjutkan kasus kekerasan berbasis gender melalui sistem peradilan formal, dan hal ini akan dipertimbangkan dalam semua perencanaan dan pengembangan yang dilakukan pada masa depan.

### ***5.2 Kesulitan dalam melanjutkan kasus kekerasan berbasis gender melalui sistem peradilan pidana formal***

Kalaupun korban kekerasan berbasis gender memilih untuk melanjutkan kasusnya melalui sistem peradilan formal, seringkali kasusnya baru diselesaikan oleh pengadilan setelah enam bulan sampai satu tahun. Walaupun 14 dari ke-28 kasus yang dirujuk kepada VSS selama periode enam bulan terakhir kemudian dilanjutkan ke pengadilan, hanya lima kasus diselesaikan di pengadilan.

Namun statistik VSS untuk kasus yang diselesaikan di pengadilan pada 2006, (walaupun hanya berdasarkan lima kasus), menunjukkan bahwa semua kasus ini diselesaikan dengan putusan bersalah, dan dalam empat dari kelima kasus tersebut tersangka memang dihukum. Jadi, walaupun ada banyak faktor yang mencegah korban melanjutkan kasusnya di pengadilan, hasil yang dicapai pada tahun ini untuk kasus yang diselesaikan di pengadilan adalah cukup positif.

### ***5.3 Kesulitan berhubungan dengan keberadaan hakim dan jaksa internasional, dan bahasa yang digunakan dalam sistem hukum***

Kedatangan staf internasional (hakim dan jaksa) di sistem yudisial dalam hal tertentu meningkatkan kelancaran proses peradilan, tetapi selain ini juga menimbulkan tantangan. Kebanyakan jaksa internasional hanya berbicara bahasa Portugis, yang berarti komunikasi antara jaksa dan korban, dan jaksa dan VSS, sangat sulit. Selain itu, banyak jaksa internasional hanya diberi kontrak jangka pendek – dan penggantian staf yang begitu pesat berarti (a) kasus sering terlupakan dalam sistem peradilan, dan (b) VSS dan pelayanan dukungan lain harus selalu membentuk kembali hubungan dengan jaksa. Akhirnya, kedatangan hakim internasional (yang juga sering diberi kontrak jangka pendek) berarti bahwa hakim tidak berbicara bahasa yang dimengerti korban, saksi atau staf VSS, dan sering mempunyai pengertian terbatas pada undang-undang yang berlaku atau pelayanan dukungan yang tersedia.

Banyak masalah yang berhubungan dengan keberadaan hakim dan jaksa internasional ada di luar pengendalian VSS. Namun, VSS telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi masalah komunikasi antara aktor internasional dan staf nasional VSS dengan memberi latihan intensif dalam bahasa Portugis kepada staf VSS – yang meningkatkan

kemampuan VSS untuk bertindak sebagai perantara bagi korban dan jaksa. Latihan ini dihentikan selama bulan Juni setelah guru yang bersangkutan kembali ke Portugal. Lebih banyak latihan bahasa diperlukan untuk meningkatkan keterampilan staf untuk menggunakan bahasa Portugis. VSS juga berusaha untuk menjamin bahwa kasus yang telah dirujuk ke VSS tidak akan ‘terlupakan dalam sistem peradilan’, dengan melakukan kontak yang berkelanjutan dan tindakan lanjutan dengan polisi, jaksa dan staf pengadilan.

Bahasa yang digunakan dalam sistem hukum Timor Leste juga merupakan tantangan yang berkelanjutan bagi aktor yudisial dan organisasi yang bekerja di sektor peradilan. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste mulai berlaku pada Januari 2006, baru pada bulan Maret sebuah draf terjemahan dalam Bahasa Tetun dihasilkan, dan pada saat itu pun, banyak pengacara asal Timor Leste (yang semua mempelajari hukum dalam Bahasa Indonesia) merasa bahwa terjemahan ke dalam Bahasa Tetun sulit dimengerti. Pada bulan Mei VSS memberi dana agar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan diharapkan bahwa hal ini akan membuat dokumen tersebut lebih gampang diakses bagi orang Timor Leste yang bekerja di sektor hukum.

#### **5.4 *‘Krisis’ keamanan dan politik pada bulan Mei – Juni di Timor Leste***

Dampak dari krisis keamanan di Timor Leste pada bulan Mei – Juni 2006 pada program VSS dan kegiatan VSS yang dilakukan sebagai jawaban terhadap krisis, telah dibahas di atas. Persoalan ini merupakan tantangan terbesar yang berdampak pada program VSS – serta kemampuannya untuk melakukan kegiatan sebagaimana direncanakan pada tahun ini. Salah satu fokus dalam program VSS pada tahun ini adalah memperluas jangkauan dari program VSS supaya pelayanan yang disediakan oleh VSS dapat diakses oleh korban kekerasan berbasis jender di Manatutu, Baucau, Lautem dan Viqueque. Oleh karena keprihatinan tentang keamanan staf, VSS belum bisa melakukan kunjungan berkala ke distrik-distrik tersebut. Tetap sulit untuk meramalkan kapan situasi akan menjadi cukup stabil untuk membuat staf merasa aman untuk melakukan perjalanan ke distrik-distrik.

Di distrik Dili, perubahan terbesar yang berdampak pada program VSS adalah pemindahan sebagian besar penduduk Dili ke dalam pusat-pusat pengungsi, dan kenyataan bahwa lembaga VPU hampir samasekali tidak berfungsi. Pada masa lalu VSS sangat tergantung pada fungsinya VPU, karena dalam keadaan normal, sebagian besar rujukan yang diberikan kepada VSS (86%) berasal dari VPU. Pada masa lalu, setelah seorang korban dirujuk kepada VSS dari VPU, kemudian VSS mendukung korban untuk melanjutkan kasusnya melalui sistem peradilan pidana formal. Kalau VPU tidak berfungsi, VSS harus meneliti cara-cara untuk menyesuaikan pendekatannya supaya

**LAPORAN PERTENGAHAN TAHUN - VICTIM SUPPORT SERVICE  
JANUARI – JUNI 2006**

dapat menjamin bahwa korban kekerasan berbasis jender tetap mempunyai akses pada dukungan hukum.

## **6. Sumber Daya Dana & Pengeluaran**

Pada tahun 2006 *Victim Support Service* menerima banyak dukungan dari *Canada Local Initiatives Fund*, *Finnish Foundation for Human Rights* (KIOS), Kedutaan Besar Amerika Serikat di Timor Leste, UNFPA dan *The Asia Foundation*. Donor-donor lain yang memberi dukungan tidak langsung kepada *Victim Support Service* (dengan mendukung unit-unit lain dalam JSMP) adalah *New Zealand Agency for International Development*, *United States Agency for International Development*, *Australian Agency for International Development*, *Norwegian Female Lawyers Association* (FOKUS) dan Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta. Anggaran belanja dan pengeluaran VSS untuk enam bulan pertama dari tahun 2006 diuraikan di bawah.

### **Pengeluaran *Victim Support Service* 1 Januari – 30 Juni 2006**

<b>Item</b>	<b>CFLI</b>	<b>KIOS</b>	<b>Kedutaan Besar AS</b>	<b>TAF</b>	<b>UNFPA</b>	<b>Total Pengeluaran</b>
Personil	\$2,769	\$2,023	\$14,532	\$646	\$826	\$20,797
Perjalanan	\$236	\$30	\$169	-	-	\$435
Peralatan	\$265	\$2,319	\$1,581	\$340	\$248	\$3,344
Perlengkapan Kantor	\$150	\$304	\$69	-	\$41	\$564
Transportasi, Akomodasi & Makanan (Dukungan bagi Korban)	\$663	-	\$22	-	-	\$684
Advokasi & Sosialisasi	\$10,965	\$3,135	\$3,055	-	-	\$17,155
Latihan & Lokakarya	-	\$13	-	-	-	\$13
Lain (Biaya Operasi)	\$736	\$830	\$200	\$160	-	\$1,926
<b>Total Pengeluaran 1 Januari - 30 Juni 2006</b>	<b>\$15,535</b>	<b>\$8,655</b>	<b>\$19,628</b>	<b>\$1,146</b>	<b>\$1,115</b>	<b>\$44,918</b>